

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA
DAERAH SERTA PEMETAANNYA BERDASARKAN
INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Muhamad Rifa'i
145020101111085**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH SERTA
PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN
KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)

Yang disusun oleh :

Nama : Muhamad Rifa'i
NIM : 145020101111085
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 November 2018.

Malang, 12 November 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Susilo, SE., MS

NIP. 196010301986011001

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH SERTA
PEMETAANNYA BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN
KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH
(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2017)**

Muhamad Rifa'i*, Susilo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

*Email: Muhamadrifai2014@gmail.com

**Email: Susilo.feb@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya fenomena *Flypaper effect* pada Belanja Daerah dan menganalisis pemetaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang mengalami *Flypaper effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2013-2017. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan estimasi regresi data panel menggunakan program *eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan secara umum dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017 tidak terjadi *Flypaper effect*. Pada pemetaan kuadran didapatkan kuadran dengan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi dibawah rata-rata mengalami *Flypaper effect*.

Kata kunci: Desentralisasi Fiskal, Belanja Daerah, Flypaper effect, Indeks Kemampuan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem sentralisasi telah beralih menjadi sistem desentralisasi. Perubahan sistem ini berujung pada kebijakan dilaksanakannya otonomi daerah. Diantara tujuan kebijakan otonomi daerah ini dilakukan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak secara langsung dari implementasi otonomi daerah dan desentralisasi adalah meningkatnya kebutuhan dana yang cukup besar sebagai penopang untuk kemandirian pemerintah daerah.

Sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain yang sah. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal (*Fiscal gap*) antar daerah, Pemerintah Pusat memberikan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Berbeda dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), kewenangan penggunaan DAU diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*Good governance*). Hal ini sejalan dengan tujuan utama dilakukannya sistem otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik (*Public service*) serta memajukan Perekonomian daerah (UU no 32 Tahun 2004). Sayangnya, alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja akan tetapi kurang memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah pemerintah daerah hanya menggantungkan pada transfer pemerintah pusat. Ketika pemerintah daerah mendapatkan dana transfer yang besar, maka pada periode selanjutnya pemerintah daerah akan berusaha agar dana transfer tetap besar pada periode mendatang. Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia (Kuncoro, 2007). Hal ini justru bertolak belakang dengan tujuan adanya dana transfer dimana seharusnya menjadi stimulus dalam kemandirian daerah, tidak sebaliknya menjadi semakin tergantung dengan pemerintah pusat.

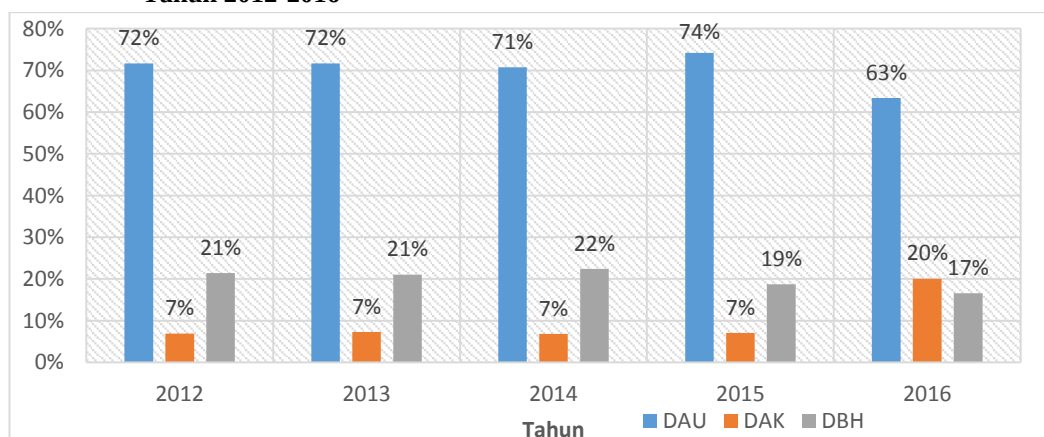
Tabel 1 Presentase Kontribusi Pendapatan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Komposisi Pendapatan Provinsi, Kabupaten/Kota (%)		
		Dana Transfer	PAD	Lain-lain yang sah
1	2012	66,00%	20,00%	14,00%
2	2013	63,43%	20,56%	16,02%
3	2014	60,45%	22,67%	16,88%
4	2015	55,93%	24,11%	19,96%
5	2016	58,65%	22,26%	19,08%

Sumber: DJPK 2017, data diolah

Dari Tabel 1 diatas, terlihat kontribusi dana transfer memiliki porsi terbesar dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana lain-lain yang sah. Hingga tahun 2016, kontribusi dana transfer pada pendapatan daerah berkisar antara 55% hingga 66%. Secara spesifik ,pada Gambar 1.1 berikut, terlihat perkembangan dana perimbangan dari tahun 2012 hingga tahun 2016 masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum. Sebagaimana data pada Tabel 1.1, hingga tahun 2016 persentase dana transfer masih menempati lebih dari setengah pendapatan daerah. Komposisi dana transfer seperti ini dikhawatirkan muncul perilaku asimetris dari pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga pengaruh dana transfer pusat terhadap belanja daerah justru memiliki porsi lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Kondisi seperti ini mengindikasikan terjadinya fenomena perilaku asimetris pemerintah daerah yang menyebabkan terjadinya in-efisien pada dana transfer yang kemudian disebut dengan istilah *flypaper effect*.

Gambar 1 Grafik Komposisi Dana Perimbangan Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: DJPK, data diolah

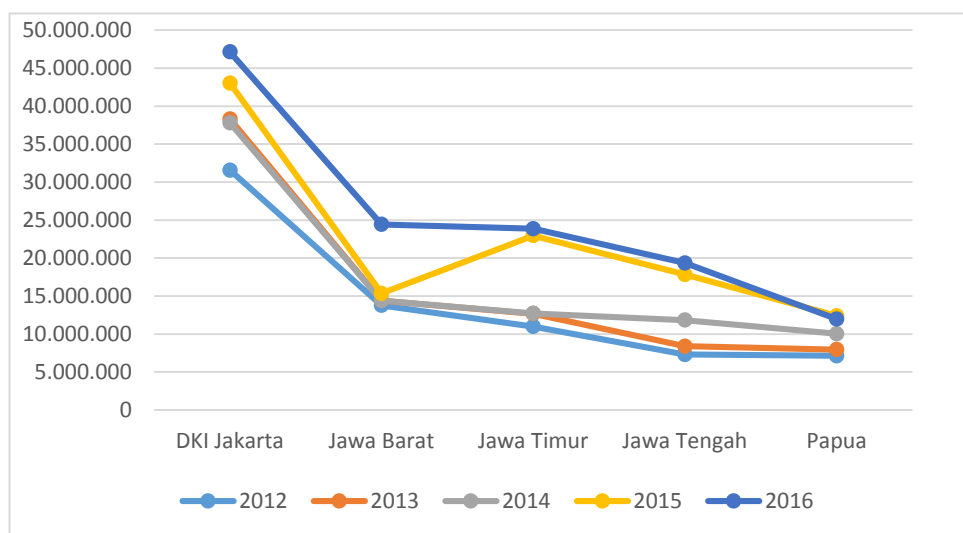
Fenomena *flypaper effect* terjadi pada kondisi dimana Pemerintah Daerah dalam merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari dana transfer atau spesifiknya pada transfer tidak

bersyarat (*Unconditional grants*) daripada PAD sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah. *Unconditional grants* yang diproksikan dengan DAU ditentukan berdasarkan celah fiskal yaitu kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan alokasi dasar yang dialokasikan secara keseluruhan (*Lump sum*) dari pemerintah pusat (Oktavia, 2014). Seperti yang diungkapkan oleh Turnbull dalam Listorini (2012), bahwa fenomena *Flypaper effect* membawa implikasi lebih luas. Transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar dibanding penerimaan transfer itu sendiri.

Penelitian mengenai fenomena *Flypaper effect* sebelumnya telah banyak dibahas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diantara hasil penelitian yang pernah dilakukan seperti (Fisher, 1982 dalam Halim, 2002) yang menyebutkan bahwa di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah. Khususnya di daerah Winconsin di Amerika Serikat sebesar 47% pendapatan pemerintah daerah berasal dari transfer pemerintah pusat. Di negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran pemerintah daerah adalah 85% di Afrika selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko (Deller et al, 2002 dalam Oktavia, 2014).

Kuncoro (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Fenomena *Flypaper effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia” menyatakan bahwa terjadi *Flypaper effect*. Afrizawati (2012) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis *Flypaper effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan” juga menghasilkan kesimpulan terjadi *Flypaper effect*. Sementara dalam penelitian yang lain justru terjadi sebaliknya, Pramuka (2010) menyimpulkan bahwa tidak terjadi *Flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. Penelitian oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) ternyata menyimpulkan bahwa *Flypaper effect* tidak hanya terjadi di daerah dengan PAD rendah namun juga mengindikasikan terjadi pada PAD tinggi.

Gambar 2 Realisasi Belanja Daerah Indonesia Tahun 2012-2016

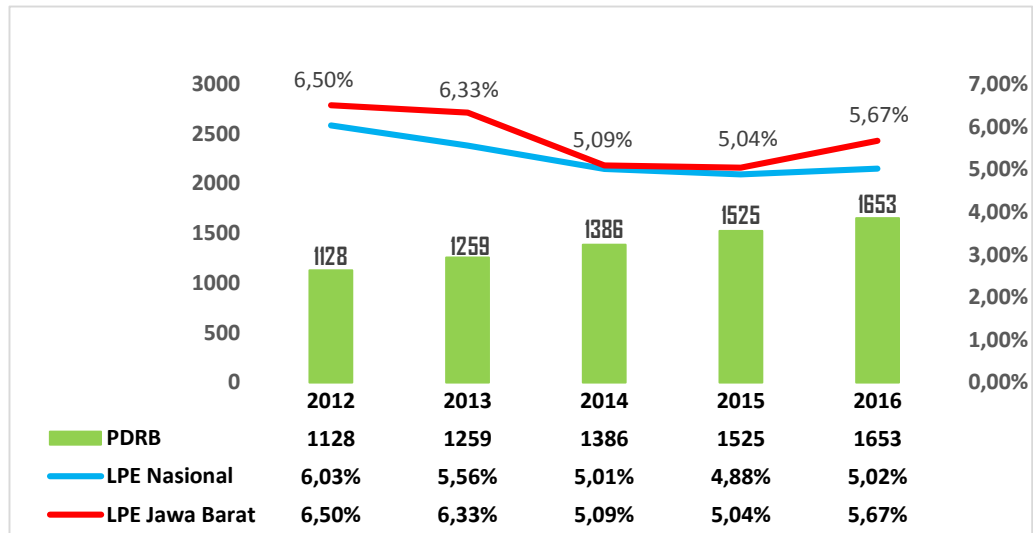


Sumber: DJPK 2017, data diolah

Realisasi Belanja Daerah pada Gambar 2 berikut menggambarkan capaian realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Dampak dari besarnya Belanja Daerah seharusnya dapat meningkatkan tingkat pelayanan publik yang kemudian diiringi dengan pembangunan. Perubahan aktivitas pemerintah tersebut dapat menggeser fungsi produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Disisi lain pertumbuhan ekonomi seperti ini akan memicu peningkatan pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lainnya.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya hanya mengaitkan terjadinya *Flypaper effect* ini dengan kondisi naiknya dana transfer sehingga memicu kenaikan belanja daerah. Padahal disisi lain kondisi ini justru dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dimana dapat memicu timbulnya pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan lainnya.

Gambar 3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat 2017, data diolah

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat rata-rata diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tren pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 hingga tahun 2015 justru mengalami penurunan. %. Padahal Pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi stimulus dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga pertumbuhan PAD ini dapat mengimbangi dana transfer dari Pemerintah Pusat. Daya tangkap pemerintah daerah tersebut dapat diamati melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang terdiri atas Growth PAD, Share PAD, dan Elastisitas PAD. Ketiga hal tersebut merupakan cerminan kapasitas dan upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya. Timbulnya *gap research* tersebut melatarbelakangi penulis tertarik melakukan penelitian ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*Public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; kedua, menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002) dalam Amalia (2017).

Otonomi daerah secara luas mulai ditempatkan pada daerah yang kemudian disertai penyerahan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Menurut handayani (2009) otonomi daerah membawa dua implikasi khusus bagi pemerintah daerah yaitu semakin meningkatnya biaya ekonomi (*high cost economy*), dan yang kedua adalah efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu desentralisasi membutuhkan dana yang memadai bagi

pelaksanaan pembangunan di daerah. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pemerintah menerapkan desentralisasi fiskal.

Menurut Khusaini (2006), desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang, dan sumber-sumber daya (dana, personil dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintah daerah. desentralisasi dapat pula diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal membawa implikasi terjadinya pergeseran beberapa tanggung jawab terhadap pendapatan (revenue) dan atau pembelanjaan (expenditure) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (Handayani 2009). Konsep desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap struktur dan fungsi dari keuangan daerah. Anggaran daerah dalam bentuk APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah selain untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan fiskal daerah. Berdasarkan UU No.33 tahun 2004, sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Mekanisme transfer dari pusat ke daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Sedangkan dana perimbangan sendiri terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan (*money follows function*).

Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar dalam memanfaatkan dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah maka disebut dengan istilah *Flypaper effect*. Istilah *Flypaper effect* didasari pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan bahwa "*Money sticks where it hits*". Menurut Maimunah, (2006) dalam Amalia, (2017). Menurut Sagbas dan Saruc (2008) ada dua teori yang sering digunakan dalam penentuan *Flypaper effect* yaitu: Teori *Fiscal illusion* dan Teori *The Bureaucratic model*. Teori *Fiscal illusion* mengemukakan bahwa terjadinya *Flypaper effect* disebabkan adanya ketidaktahuan penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Sedangkan teori *The Bureaucratic model* menganggap terjadinya *Flypaper effect* karena perilaku birokrat yang cenderung mudah untuk menghabiskan dana transfer daripada mengambil kebijakan untuk menaikkan pajak dan retribusi.

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah unsur yang dapat digunakan dalam penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata-rata penjumlahan dari *Indeks Growth*, *Indeks Share*, dan indeks elastisitas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penjelasan deskriptif. Objek analisis berasal dari data keuangan dan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 hingga tahun 2017. Analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak statistik yaitu *Eviews* versi 10. Data keuangan daerah diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian (DJPK). Data mengenai Pertumbuhan Ekonomi berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang kemudian diolah. Sedangkan data Indeks Kemampuan Keuangan merupakan hasil pengolahan dari kedua sumber data tersebut. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$BDIT = B_0 + B_1 LAGBD_{it} + B_2 UG_{it} + B_3 PAD_{it} + B_4 PP_{it} + \epsilon_t$$

Keterangan:

BD_{it}	= Belanja Daerah dari daerah i pada tahun t
B₀	= Intercept
LAGBD_{it}	= Belanja Daerah pada tahun sebelumnya (t-1)
UG_{it}	= Unconditional Grants (DAU+DBH) dari daerah i pada tahun t
PAD_{it}	= Pendapatan Asli Daerah dari daerah i pada tahun t
PP_{it}	= Pertumbuhan penduduk dari daerah i pada tahun t
ε_t	= Error term

D. PEMBAHASAN

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2017 pada umumnya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik dalam hal pembiayaan

maupun untuk menjalankan kegiatan operasional. Untuk melihat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah maka perlu untuk melihat kontribusi dari PAD daerah tersebut terhadap total Belanja Daerahnya. Tabel 2 Berikut merupakan presentase PAD terhadap total dari realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017:

Tabel 2 Presentase PAD terhadap total realisasi Belanja Daerah tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Provinsi Jawa Barat	67,89%	72,30%	83,96%	61,70%	50,95%
Kabupaten/Kota	19,60%	24,60%	23,97%	15,41%	25,38%

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat yang bervariasi. Akibatnya terjadi perbedaan tingkat kontribusi dari PAD terhadap Belanja Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

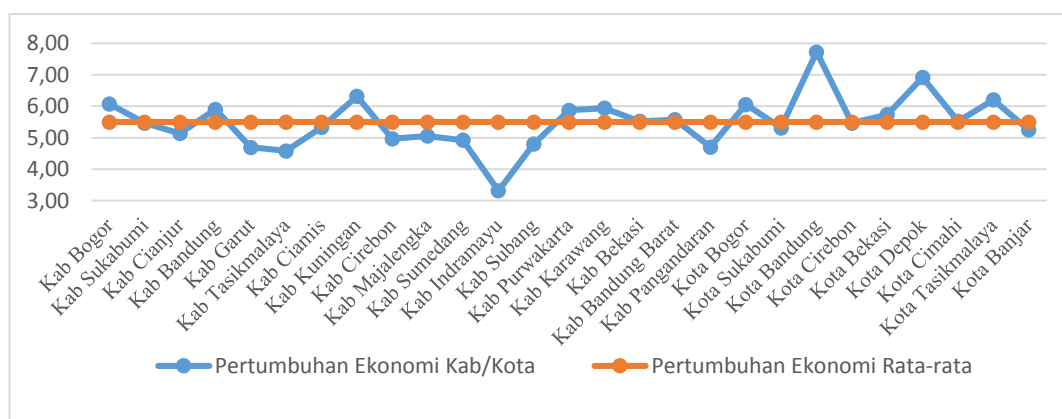
Tabel 3 Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat menurut kelompok persentase PAD terhadap Belanja daerah tahun 2013-2017

Kelompok presentase PAD terhadap Belanja Daerah (%)	Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat				
	2013	2014	2015	2016	2017
<10,00	7	7	4	4	2
10,00-19,99	9	10	10	12	15
20,00-30,00	10	10	4	8	3
>30,00	0	0	9	3	7
Total	26	27	27	27	27

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Sedangkan realisasi Dana Alokasi Umum dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2013-2017 pada umumnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi jumlah Dana Alokasi Umum dari pemerintah daerah ini merepresentasikan tingginya celah fiskal (*Fiscal gap*) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Rata-rata kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam kurun tahun 2013-2017 sebesar 49,74 persen. Tingkat kontribusi dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah turun secara berurutan hingga tahun 2016. Disisi lain realisasi dari Pendapatan Asli Daerah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Pertumbuhan Ekonomi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat menggambarkan keadaan riil ekonomi daerah. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2013-2017 sebesar 5,5 persen.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah diukur melalui analisis kemampuan keuangan daerah yaitu dengan pengukuran indeks growth, Indeks Share, juga Indeks Elastisitas dari PAD. Hasil dari pengolahan Indeks Kemampuan Keuangan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4 Indeks Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Growth	Share	Elastisitas	IKK
1	Kabupaten Bogor	0.59	0.51	0.10	0.40
2	Kabupaten Sukabumi	0.5	0.72	0.09	0.44
3	Kabupaten Cianjur	0.69	0.54	0.13	0.46
4	Kabupaten Bandung	0.62	0.58	0.10	0.44
5	Kabupaten Garut	0.39	0.46	0.08	0.31
6	Kabupaten Tasikmalaya	0.42	0.44	0.09	0.32
7	Kabupaten Ciamis	0.68	0.68	0.13	0.49
8	Kabupaten Kuningan	0.65	0.65	0.10	0.47
9	Kabupaten Cirebon	0.67	0.62	0.13	0.48
10	Kabupaten Majalengka	0.48	0.47	0.09	0.35
11	Kabupaten Sumedang	0.67	0.66	0.14	0.49
12	Kabupaten Indramayu	0.68	0.64	0.21	0.51
13	Kabupaten Subang	0.64	0.65	0.13	0.47
14	Kabupaten Purwakarta	0.34	0.38	0.06	0.26
15	Kabupaten Karawang	0.54	0.68	0.09	0.44
16	Kabupaten Bekasi	0.56	0.60	0.10	0.42
17	Kabupaten Bandung Barat	0.58	0.60	0.10	0.43
18	Kabupaten Pangandaran	0.33	0.22	0.07	0.21
19	Kota Bogor	0.52	0.41	0.09	0.34
20	Kota Sukabumi	0.61	0.67	0.11	0.47
21	Kota Bandung	0.37	0.68	0.05	0.37
22	Kota Cirebon	0.59	0.47	0.11	0.39
23	Kota Bekasi	0.59	0.39	0.10	0.36
24	Kota Depok	0.69	0.59	0.10	0.46
25	Kota Cimahi	0.69	0.46	0.12	0.43
26	Kota Tasikmalaya	0.62	0.93	0.10	0.55
27	Kota Banjar	0.39	0.35	0.07	0.27

Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2018

Rata-rata Indeks Kemampuan Keuangan 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,41 atau masuk dalam kategori sedang. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat Indeks Kemampuan Keuangan rendah, diantaranya adalah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.

Tabel 5 Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 - 0,33	Rendah
0,34 - 0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

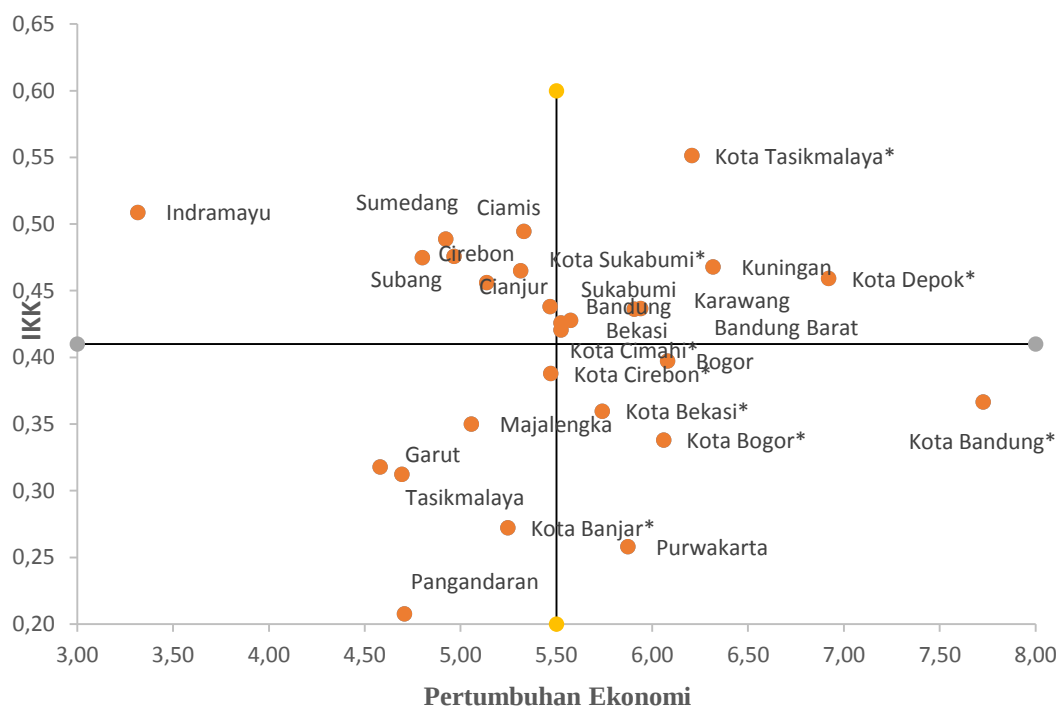
Sumber: Bappenas, 2003

Hasil pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi empat kudran sebagai berikut:

1. Kuadran Satu: Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sukabumi.
2. Kuadran Dua: Kabupaten Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

3. Kuadran Tiga: Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor
4. Kuadran Empat: Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon, dan Kabupaten Garut.

Gambar 5 Pemetaan Kuadran berdasarkan IKK dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Data diolah, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2018

Hasil pengujian dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai R-Squared 0,901205. Nilai R-Squared tersebut berarti bahwa variabel independen yang terdiri dari Lag Belanja Daerah (LagBD), Unconditional Grants (Dana Transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Penduduk (PP) dapat menjelaskan varians dari variabel dependen yaitu Belanja Daerah sebesar 90,12%. Sedangkan 9,88% dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* tahap pertama, $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	Nilai Prob (Uji t)	Keterangan
C	-26.63109	0.0744	Tidak Signifikan
LagBD	-0.020843	0.8132	Tidak Signifikan
UG	0.062213	0.3801	Tidak Signifikan
PAD	0.358431	0.0001	Signifikan
PP	3.149588	0.0074	Signifikan
R-Squared: 0,901205			
Nilai Prob. (Uji F): 0,000000			

Sumber: Hasil Eviews 10

Hasil dari uji f diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat $\alpha = 5\%$ (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah di 27 Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat. Adapun pada hasil uji t yang menunjukkan signifikan dari semua variabel secara parsial menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Dengan demikian dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$BD = -0.020843 \text{ LagBD} + 0.062213UG + 0.358431 \text{ PAD} + 3.149588 \text{ PP}$$

Persamaan model diatas yang merupakan hasil pengolahan data keseluruhan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat bahwa pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah lebih besar dibandingkan pengaruh *Unconditional Grants*. Selain itu probabilitas t parsial pada *Unconditional Grants* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan probabilitas t parsial pada Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum tidak ada fenomena *Flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Lag belanja daerah (t-1) dan unconditional grants (DAU+DBH) secara umum dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa unconditional grants memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa secara umum kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tidak terbukti terjadi fenomena *flypaper effect*.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa daerah dengan nilai indeks kemampuan keuangan yang tinggi tidak terbukti terjadi fenomena *flypaper effect*, yaitu pada kuadran satu dan dua. Sebaliknya, indeks kemampuan keuangan rendah terbukti terjadi fenomena *flypaper effect* atau minimal terindikasi terjadi fenomena *flypaper effect* seperti pada kuadran tiga dan kuadran empat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerahnya. dengan mengubah sistem tradisional budgeting menjadi pemerintah wirausaha, sehingga lebih berfokus pada desentralisasi pendapatan (*revenue*) dibandingkan desentralisasi belanja. sedang dalam penganggaran menggunakan performance budgeting sehingga indikator keberhasilan tidak hanya mencapai output yang diinginkan melainkan juga outcome yang jelas.
2. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan dan menggali potensi pendapatan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah seperti industri, agroindustri, pariwisata danlainnya.
3. Perlunya pemerintah mendahulukan alokasi belanja modal dibanding belanja lainnya sebagai stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga daerah tidak ketergantungan dengan dana transfer dari pusat.
4. Diharapkan penelitian berikutnya dengan bidang yang sama dapat mengembangkan variabel lain diluar model dalam penelitian ini seperti SiLPAmenambahkan pengaruh terjadi atau tidaknya fenomena *Flypaper effect* terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah.